



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

2021

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG
GORONTALO



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO

 Jalan Achmad Ndjamuddin No. 7 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

 (0435) 823727

 kpknlgorontalo@kemenkeu.go.id

 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlgorontalo>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv-v
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	A.Penjelasan Umum Organisasi.....
	2
	B.Peran Strategis KPKNL.....
	7
	C.Isu Strategis Organisasi
	8
	D. Permasalahan Utama.....
	9
	D.Sistematika Laporan
	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	11
	A.Rencana Strategis
	12
	B.Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....
	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	18
	A. Capaian Kinerja KPKNL Gorontalo.....
	19
	B. Realisasi Anggaran.....
	48
BAB IV	PENUTUP
	49
LAMPIRAN :	51
Perjanjian Kinerja KPKNL Tahun 2021	52
Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Tahun 2021	60
Dokumentasi Kegiatan	61

PENGANTAR

Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Gorontalo di tahun 2021 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP- 147/KN/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2015-2019.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Gorontalo adalah 113,38% dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN, secara keseluruhan berwarna hijau. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi, dukungan dan kerja sama yang baik dengan semua *stakeholders* di lingkungan KPKNL Gorontalo.

Demikian Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran yang dibebankan di tahun 2021.

Gorontalo, 22 Januari 2022

Kepala KPKNL Gorontalo



Diana Setiastanti

NIP 19751230 200212 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Gorontalo Tahun 2021 adalah iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Gorontalo selama tahun 2021 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Laporan KPKNL Gorontalo Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Gorontalo atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Gorontalo menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

KPKNL Gorontalo menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024 yaitu pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial, pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, dan birokrasi layanan publik DJKN yang *agile*, efektif dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2021 berdasarkan metodologi *balanced score card* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta strategi tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis yang terkait dengan KPKNL Gorontalo yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien;
4. Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif;
5. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif;
6. Edukasi yang efektif
7. Pengendalian dan pengawasan yang efektif
8. SDM yang kompeten;
9. Organisasi yang *fit-for-purpose*;

10. Pengelolaan keuangan yang optimal

Secara umum, pencapaian IKU pada tahun 2021 sesuai target yang ditetapkan Kantor Pusat yaitu 19 IKU dimana 18 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus kuning dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,38 %.

B A B I

P E N D A H U L U A N

- Penjelasan Umum Organisasi
- Peran Strategis
- Isu Strategis
- Permasalahan Utama
- Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.01/2016, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unit vertikal yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 85 Kantor Operasional (KPKNL). Menurut PMK tersebut, KPKNL selaku instansi vertikal DJKN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi: (a) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (b) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (c) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; (d) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; (e) pelaksanaan pelayanan penilaian; (f) pelaksanaan pelayanan lelang; (g) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; (h) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; (i) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; (j) pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang; (k) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; (l) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; (m) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan (n) pelaksanaan administrasi KPKNL.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo merupakan salah satu dari 85 (delapan puluh lima) Kantor Operasional yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala KPKNL Gorontalo dibantu oleh unit eselon IV (6 Kepala Seksi dan 1 Kepala Sub Bagian), yaitu:

1. **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penyiapan bahan penyusunan rencana strategi dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan Barang Milik Negara di lingkungan KPKNL Gorontalo.
2. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan penyusunan Daftar Barang Milik Negara/Kekayaan Negara.
3. **Seksi Pelayanan Penilaian (PP)**, mempunyai tugas menyusun konsep standar proses penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah dan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
4. **Seksi Piutang Negara (PN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan

hutang, pengusulan pencegahan keluar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, inventarisasi piutang negara, pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.

5. **Seksi Pelayanan Lelang (PL)**, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan, kutipan dan grosse risalah lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan superintenden Pejabat Lelang serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).
6. **Seksi Hukum dan Informasi (HI)**, mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
7. **Seksi Kepatuhan Internal (KI)**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Selain memiliki jabatan struktural di atas, KPKNL Gorontalo juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional tersebut antara lain:

- a. Pelelang;
- b. Penilai Pemerintah dan
- c. Juru Sita dan Pemeriksa; berada di bawah Kasi Piutang Negara,

Dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsinya, KPKNL Gorontalo memiliki moto AKSI yang merupakan singkatan dari Akuntabel, Konsisten, Solid dan Inovatif. Kata AKSI secara harafiah mengandung arti gerakan atau tindakan, sehingga KPKNL Gorontalo diharapkan dapat mengedepankan tindakan nyata dan solid terkait Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Gorontalo didukung oleh 33 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, hukum, Teknologi dan sebagainya. Komposisi pegawai KPKNL Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur adalah sebagai berikut :

TABEL 1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SLTA	-	2	3	-	5
DI	-	3	-	-	3
DIII	-	6	1	-	7
SI/DIV	-	-	12	-	12
S2	-	-	5	1	6
Jumlah	-	11	21	1	33

Sumber : Data Simpeg per 24 Desember 2021

TABEL 2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN UMUR dan GOLONGAN

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	-	6	6	-	12
31-40	-	3	7	-	10
41-50	-	-	3	1	4
Di atas 50	-	2	4	-	6
Total	-	11	20	1	32

Sumber : Data Simpeg per 24 Desember 2021

TABEL 3
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN dan GOLONGAN

Jenis Kelamin	I	II	III	IV	Jumlah
Laki-Laki	-	8	18	0	26
Perempuan	-	3	2	1	6
Total	-	11	20	1	32

TABEL 4
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan fungsional	Jumlah
1	Pelelang	3
2	Penilai	2
	Total	5

TABEL 5
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

No.	Jabatan fungsional	Jumlah
1	Jurusita	5
2	Pemeriksa	4
	Total	9

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi pada KPKNL Gorontalo merupakan alat penunjang yang diperlukan guna menjalankan kegiatan operasional kantor. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, KPKNL Palopo saat ini menempati Gedung Kantor sendiri terletak di Jalan Achmad Nadjamuddin No 7, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Berikut kondisi sarana dan prasarana KPKNL Palopo :

1. Rumah Negara

Rumah Negara yang berada di KPKNL Palopo berjumlah 8 (delapan) unit yang terdiri dari:

- 4 (unit) unit rumah negara terletak di Jalan Achmad Nadjamuddin No 7, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- 4 (unit) unit rumah negara terletak di Jalan Gelatik, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua di KPKNL Gorontalo berjumlah 11 (sepuluh) unit yang terdiri dari

No.	KANTOR	RODA 2				RODA 4				TOTAL
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml	
1	KPKNL Gorontalo	3	1	2	6	4	-	1	5	11

Pada tahun 2021 selain menjalankan tugas dan fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, KPKNL Gorontalo juga mendapat tugas tambahan yaitu mensukseskan Program Keringanan Hutang atau yang dikenal dengan *Crash Program* yang berada di wilayah kerjanya. Tugas, fungsi, dan tugas tambahan tersebut pada hakikatnya merupakan amanat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut dan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka disusunlah Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo Tahun Anggaran 2021 yang harus disampaikan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Gorontalo.

B. Peran Strategis KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang mempunyai peran strategis dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara

Peran strategis KPKNL Gorontalo di bidang pengelolaan BMN yaitu dengan cara melakukan optimalisasi pengelolaan BMN yang berujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan Negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna BMN telah dilakukan dengan cara utilisasi kekayaan Negara (PSP, pemanfaatan, pemindahtanganan dan sebagainya), pengawasan dan pengendalian BMN, pembinaan, dan penatausahaan BMN (rekonsiliasi BMN).

2. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN, penilaian mempunyai peranan penting dalam menyajikan nilai yang wajar terhadap BMN tersebut, misalnya dalam rangka penyusunan LKPP, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Selain itu, selama tahun 2021, KPKNL Gorontalo telah melakukan penilaian aset milik pemerintah daerah (BMD) yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo yaitu Pemkab Gorontalo, Pemkab Bone Bolango, Pemkab Gorontalo Utara, Pemkab Boalemo, Pemkab Pohuwato, Pemkot Gorontalo, Pemprov. Gorontalo,

penilaian asset pemda tersebut dilakukan dalam rangka penetapan nilai asset pada LKPD maupun pemindahtanganan BMD.

3. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Gorontalo di bidang pegurusan Piutang Negara yaitu dalam rangka penyelamatan keuangan negara berupa piutang negara baik yang berasal dari piutang perbankan maupun non perbankan.

4. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang merupakan sarana transaksi jual beli yang terbuka untuk umum. Dalam rangka memberikan pelayanan lelang, KPKNL Gorontalo terus melakukan upaya penggalian potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi. Keuntungan jual beli melalui lelang yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan memberikan kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa Risalah Lelang.

5. Memberikan Kontribusi kepada Negara berupa PNPB

Dalam memberikan pelayanan di bidang pengurusan piutang Negara dan lelang, KPKNL Gorontalo telah berkontribusi terhadap penerimaan Negara khususnya penerimaan bukan pajak berupa biad pengurusan piutang Negara dan bea lelang sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.

C. Isu Strategis Organisasi

KPKNL Gorontalo telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KPKNL Gorontalo sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien;
4. Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif;
5. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif;
6. Edukasi yang efektif
7. Pengendalian dan pengawasan yang efektif
8. SDM yang kompeten;
9. Organisasi yang *fit-for-purpose*;
10. Pengelolaan keuangan yang optimal

D. Permasalahan Utama

1. Masih rendahnya kesadaran dari Satker untuk melaporkan pemanfaatan BMN sehingga tidak maksimalnya penerimaan negara utamanya di bidang pemanfaatan BMN, kesadaran penyerahan aset idle kepada pengelola barang juga dalam hal rekonsiliasi barang;
2. Masih terdapat permasalahan BMN seperti BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, BMN dikuasai pihak lain, BMN belum ditemukan sehingga menghambat penetapan utilisasi kekayaan negara;
3. Kurangnya minat masyarakat terhadap barang lelang khususnya tanah/bangunan terkait lelang eksekusi, hal ini disebabkan karena prosedur pengosongan yang masih belum memberikan kepastian hukum kepada pembeli lelang;
4. Terdapat keberatan/perlawanan/gugatan terhadap pelaksanaan lelang antara lain jenis lelang hak tanggungan sebagai penyelesaian dari kredit macet;
5. Terkait Pengurusan Piutang Negara, dari penyerahan piutang negara yang ada tidak disertai barang jaminan, nilai jaminan tidak mencukupi untuk menjamin hutang;

E. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo Tahun 2021 kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I Pendahuluan

Menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2021.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun 2021.

5. Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan selama tahun 2021, KPKNL Gorontalo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Gorontalo optimis mencapai target-target di tahun yang akan datang.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis
- Ringkasan Perjanjian Kinerja
- Penjelasan Adendum Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Di samping itu, perencanaan strategis juga merupakan proses sistematis berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang ada saat ini atau berpotensi yang dimiliki. Perencanaan strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana strategis DJKN mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang realistis yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai unit vertikal visi KPKNL adalah sesuai dengan visi yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara bahwa KPKNL sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan

kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai penjabaran dari visi tersebut, KPKNL Gorontalo memiliki 5 (lima) misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Dalam periode 2020-2024, KPKNL Gorontalo mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan di atas, KPKNL Gorontalo menetapkan strategi yang merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;

- b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
- c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- d. Komunikasi publik yang efektif.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi ke pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian disusun Sasaran Strategis KPKNL Gorontalo. Pada tahun 2021, KPKNL Gorontalo menetapkan 10 sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien;
4. Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif;
5. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif;
6. Edukasi yang efektif
7. Pengendalian dan pengawasan yang efektif
8. SDM yang kompeten;
9. Organisasi yang *fit-for-purpose*;
10. Pengelolaan keuangan yang optimal

Pada Peta Strategi KPKNL Gorontalo menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Stakeholder perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Customer perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh customer. Internal process perspective berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan learning and growth perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahabahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari 10 Sasaran Strategis, KPKNL Gorontalo mengembangkannya menjadi 19 IKU (Indikator Kinerja Utama). Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 6
SASARAN STRATEGIS DAN IKU

SASARAN STRATEGIS 1
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

(dalam rupiah)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
1.1 Persentase pengukuran tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	62
1.2 Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100
1.3. Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS sd 2016)	%	100

SASARAN STRATEGIS 2
Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
2.1. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	Indeks	88
2.2. Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	%	100

SASARAN STRATEGIS 3
Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif dan efisien

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
3. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	indeks	4,68

SASARAN STRATEGIS 4
Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
4.1 Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	%	100
4.2. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	%	100
4.3. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	22

SASARAN STRATEGIS 5
Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
5.1. Presentase efektivitas penyelesaian BKPN	%	100
5.2. Persentase produktivitas lelang	%	35
5.3. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-konvensional auction	%	92
5.4. Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	%	12,5

SASARAN STRATEGIS 6
Edukasi yang efektif

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
6. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	indeks	93

SASARAN STRATEGIS 7
Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
7. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	%	85

SASARAN STRATEGIS 8
SDM yang kompeten

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
8. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100

SASARAN STRATEGIS 9
Organisasi yang fit for purpose

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
9.1. Indeks efektifitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	indeks	84
9.2. Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	%	75

SASARAN STRATEGIS 10
Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
10. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	95,5

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

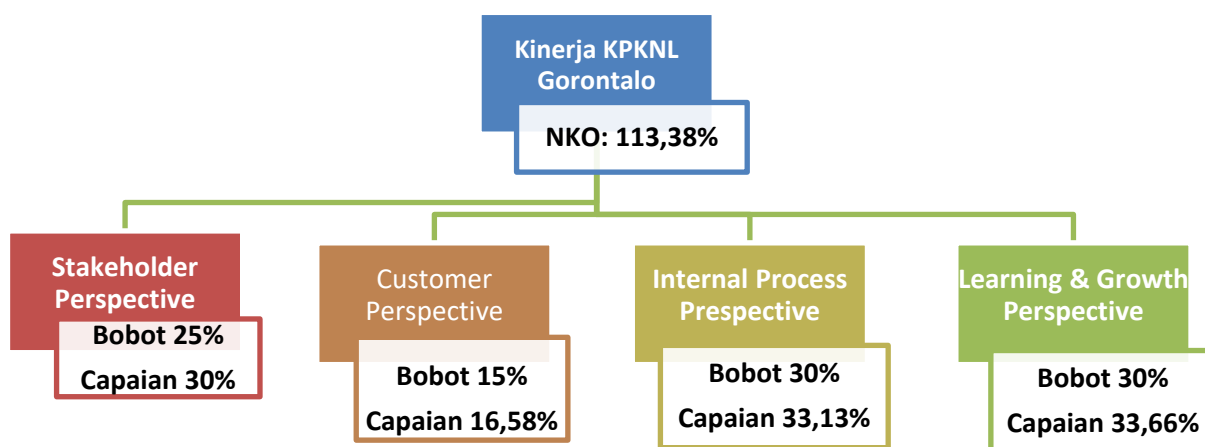
- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Gorontalo

Pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utam (IKU) pada masing-masing perpektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Gorontalo tahun 2021 adalah sebesar 113,38%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perpektif sebagai berikut:



Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2021 KPKNL Gorontalo telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

TABEL 7
CAPAIAN IKU 2021

Kode	IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket
	Stakeholder Perspective (25%)					30,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					120,00%	
1a-CP	Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/H	62%	94,09%	151,76%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	131,04%	131,042%	120,00%	hijau
1c-CP	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDs s.d 2016)	P/M	100%	123,91%	123,907%	120,00%	hijau
	Customer Perspective (15%)					16,58%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa					117,20%	
2a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	88	100,00	113,64%	113,64%	hijau
2b-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	P/M	100%	132,49%	132,49%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien					103,85%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,68	4,86	103,85%	103,85%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)					33,13%	
4	Penerapan Tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif					111,36%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100,00%	100,00%	100,00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	121,43%	121,43%	120,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	1,58%	192,82%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan lelang yang efektif					113,25%	
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	P/M	100%	125,00%	125,00%	120,00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35%	36,51%	104,32%	104,32%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	12,5%	0,00%	200,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif					102,55%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	93	95,37	102,55%	102,55%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif					114,55%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	P/M	85%	97,37%	114,55%	114,55%	hijau

	Learning & Growth Perspective (30%)					33,66%	
8	SDM yang kompeten					120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose					117,92%	
9a-N	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	P/M	84	97,83	116,47%	116,47%	hijau
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	P/M	75	89,53	119,37%	119,37%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal					98,70%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,50 %	94,26%	98,70%	98,70%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						113,38%	hijau

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu *Three* KPKNL Gorontalo Tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL Gorontalo sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal

Indikator Kinerja Utama :

1a-CP Persentase pengukuran tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK

Pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK merupakan Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

Target pengukuran tingkat kesesuaian SBSK tahun 2021 yaitu Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Rumah Negara/Mess pada beberapa satker di beberapa Kementerian Lembaga.

Capaian IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal							
	1a-CP Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	Max/
Realisasi	-	98,04%	98,04%	94,61 %	94,61%	94,09%	94,09 %	TLK

Capaian	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
----------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan satker Kemenkeu di Lingkungan KPKNL Gorontalo
- b. melakukan pendampingan dalam pengisian formulir pendataan

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2019	N/A	N/A			
2020	179	130	134	74,86%	103,08%
2021	133	-	133	100%	

1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBK Kekayaan Negara (PNBK BMN)
 - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,
 - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan
- 2) PNBK Piutang Negara (PNBK PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) PNBK Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

 - a. bea lelang,
 - b. bea lelang pegadaian,
 - c. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
 - d. biaya permohonan lelang,
 - e. penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,

f. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2021, kinerja penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diakui apabila nilai penerimaan atas PNBPN Aset, PN, dan Lelang telah masuk ke rekening kas negara sesuai Mata anggaran penerimaan yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar yang telah masuk dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN.

Capaian IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal							
	1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/
Realisasi	40,77 %	62,55%	62,55 %	109,87 %	109,87 %	131,04%	131,04 %	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- melakukan pemanfaatan BMN di lingkungan KPKNL Gorontalo
- berkoordinasi dengan satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN terutama pemanfaatan BMN dan penghapusan BMN kondisi rusak berat
- berkoordinasi dengan badan layanan umum terkait penerimaan Negara/PNBPN dari pengelolaan aset
- berkoordinasi dengan Kanwil DJPB Gorontalo terkait realisasi PNBPN Aset pada Aplikasi OM SPAN
- berkoordinasi dengan Perbankan dan Pegadaian (penggalan potensi lelang)
- berkoordinasi dengan penyerah Piutang
- berkoordinasi dengan pemohon lelang HT dan pegadaian

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	N/A	N/A			
2020	12.955.500.000	10.535.000.000	13.056.962.814	100,78%	123,94%
PNBP Pengelolaan BMN	11.000.000.000	8.580.000.000	11.487.498.317	104,43%	133,89%
PNBP Piutang Negara	4.500.000	4.000.000	12.818.077	284,85%	320,45%
PNBP Lelang	1.951.000.000	1.951.000.000	1.556.646.420	79,79%	79,79%
2021	10.986.000.000		14.396.284.752	131,04%	
PNBP Pengelolaan BMN	9.000.000.000		12.370.561.357	137,45%	
PNBP Piutang Negara	13.000.000		13.412.503	103,17%	
PNBP Lelang	1.973.000.000		2.012.310.892	101,99%	

1c-CP Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2016 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2020) diharapkan turun menjadi 95%. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN yang didownload tanggal 22 Januari 2020. Terhadap outstanding dengan mata uang asing dilakukan konversi dengan mata uang rupiah (nilai kurs tengah BI) per tanggal 31 Desember 2019.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT):
 - a. Angsuran
 - b. Penarikan/Pengembalian
 - c. Pelunasan
 - d. PSBDT
2. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2016 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

Terdapat perubahan target manual IKU dari Rp.48,52 juta menjadi Rp.206 Juta

Capaian IKU Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d.

2016) adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal							
	1c-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d. 2016)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	1,03 %	420,07 %	420,07 %	101,65 %	101,65 %	123,91%	123,91 %	
Capaian	4,12 %	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- melakukan koordinasi dengan penyerah piutang
- Melaksanakan Penagihan Secara Langsung dengan pendekatan non eksekusi
- Koordinasi dengan Penyerah Piutang (terkait penyetoran langsung ke PP-BPJS)
- Menggal Potensi PSBDT
- mengingatkan kembali debitur terkait kewajiban penyelesaian hutang
- Melakukan sosialisasi door to door terkait Crash Program Penyelesaian Piutang Negara kepada seluruh PH yang memenuhi kualifikasi awal.

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d. 2016) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	N/A	N/A			
2020	5%	3%	-	5,07%	5,07%
Nilai Outstanding	1.452.138.956	1.452.138.956	73.686.196		
2021			-	123,91%	123,91%
Nilai Outstanding	48.529.624	206.000.000	255.249.349		

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa

Indikator Kinerja Utama :

2a-CP Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang

Manajemen pelayanan yang berkualitas adalah serangkaian proses kegiatan dalam menata dan mengelola layanan-layanan yang diberikan kepada pengguna jasa sehingga mampu menghasilkan layanan yang memenuhi asas-asas (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Capaian IKU Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2a-CP Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	88	88	88	88	88	88	88	Max/ AVG
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	113,6 4%	113,64 %	113,64 %	113,64 %	113,64 %	113,64%	113,64 %	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- KPKNL Gorontalo membuat salah satu inovasi dalam pelayanan yaitu pemangkasan jangka waktu pelayanan/SOP sehingga pelayanan bisa selesai lebih cepat
- Selalu melakukan monitoring penyelesaian setiap permohonan agar dapat langsung diketahui indeks ketepatan waktu penyelesaiannya

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	85	-	96,97	114,08%	-
2020	87	-	99,64	114,52%	-
2021	88	-	100	113,64%	-

2b-CP Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II/ JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Capaian IKU Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2b-CP Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/
Realisasi	27,82 %	74,48%	74,48	105,85 %	105,85 %	132,49%	132,49 %	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Permasalahan yang dihadapi terhadap pencapaian target pokok lelang kelas I adalah :

1. Kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun
2. Karakteristik objek lelang di Gorontalo yang sulit laku (dalam tanah biasanya terdapat kuburan)

3. Pasar property cenderung stagnan

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi terkait permohonan lelang online
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pemda, dan satker di lingkungan KPKNL Gorontalo

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	46.227.155.025		19.620.562.791	42,44%	-
Pokok Lelang Kelas I	20.700.815.025		11.849.568.191	57,24%	-
Pokok Lelang Pegadaian	25.526.340.000		7.770.994.600	30,44%	-
2020	56.900.000.000	-	60.351.978.834	106,07%	-
Pokok Lelang Kelas I	19.100.000.000	-	16.460.284.034	86,18%	-
Pokok Lelang Pegadaian	37.800.000.000	-	43.891.694.800	116,12%	-
2021	66.000.000.000	-	87.445.207.562	132,49%	-
Pokok Lelang Kelas I	24.000.000.000	-	12.907.738.362	53,78%	-
Pokok Lelang Pegadaian	42.000.000.000	-	74.537.469.300	177,47%	-

3. Sasaran Strategis 3: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien Indikator Kinerja Utama :

3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada

pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan adalah sebagai berikut:

K-Wide	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
	3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target						4,68	4,68	Max/ TLK
Realisasi						4,86	4,86	
Capaian						103,85%	103,85 %	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- KPKNL Gorontalo membuat salah satu inovasi dalam pelayanan yaitu pemangkasan jangka waktu pelayanan/SOP sehingga pelayanan bisa selesai lebih cepat
- Selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan dan menerima *feedback* dari pelayanan yang telah diberikan untuk perbaikan pelayanan
- Telah dilakukan pemantauan terhadap 9 layanan unggulan

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2019	4,60	-	4,67	101,52%	-
2020	4,67	-	4,70	100,64%	-
2021	4,68	-	4,86	103,85%	-

4. Sasaran Strategis 4: Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif

Indikator Kinerja Utama :

4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan

dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik

- c. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- d. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
- e. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- f. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif							
	4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target		20%	20%	60%	60%	100%	100%	Max/
Realisasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	TLK
Capaian		120%	120%	120%	120%	100%	100%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kanwil BPN Gorontalo dan kantor pertanahan
- b. Melakukan rapat koordinasi triparted BPK, Satker dan DJKN terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi tanah
- c. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan satker yang menjadi target sertifikasi tanah

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	150	-	178	118,67%	-

2020	300	-	304	101,33%	-
2021	300	-	300	100,00%	-

4b-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Capaian IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif							
	4b-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	25%	50%	50%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	37,14 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	100%	100%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap satker yang menjadi target evaluasi kinerja BMN
- meminta data yang dibutuhkan dalam perhitungan portofolio aset kepada BPS
- melakukan pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan
- melakukan survei lapangan dalam rangka evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	N/A	N/A	-	-	-
2020	180	100	121	67,22%	121%
2021	70		85	121,43%	

4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif							
	4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	

Realisasi	0,02	2,15%	2,15%	2,12%	2,12%	1,58%	1,58%	Max/ AVG
	%							
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Surat persetujuan yang membutuhkan penilaian menggunakan nilai yang dihasilkan oleh seksi penilaian
- konsisten untuk menggunakan nilai hasil penilaian
- dilakukan mitigasi dari nilai usulan yang disampaikan pemohon, agar selalu didasarkan dengan nilai pasar wajar yang berlaku di pasaran, sehingga tidak terjadi gap yang besar dengan hasil penilaian
- melakukan proses penilaian BMN sesuai dengan standar dan ketentuan penilaian
- melakukan pembinaan kepada satker terkait usulan nilai taksiran harga yang dijadikan usulan dalam rangka permohonan penghapusan BMN dan pemanfaatan BMN
- membuat database nilai wajar BMN dan harga lelang BMN tersebut

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	N/A	N/A	-	-	-
2020	30%	-	1,49%	195,02%	-
2021	22%	-	1,58%	120,00%	-

5. Sasaran Strategis 5: Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif

Indikator Kinerja Utama :

5a-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

IKU Persentase Efektifitas penyelesaian BKPN terbagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu:

- BKPN dengan SP3N s.d. 31 Desember 2010 (Kategori I)

2. BKPN dengan SP3N tanggal 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2019 (Kategori II)
3. BKPN dengan SP3N Tahun 2020 (Kategori III)

Pembobotan atas ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. BKPN dengan SP3N s.d. 31 Desember 2010 bobot 1,5
2. BKPN dengan SP3N tanggal 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2019 bobot 1,0
3. BKPN dengan SP3N Tahun 2020 bobot 0,5

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKPN target BKPN 10 berkas.

Capaian IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif							
	5a-CP Persentase efektifitas penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/
Realisasi	70%	140%	140%	70%	70%	125%	125%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	93,33%	93,33%	120%	120%	

Isu Utama dari kegiatan ini adalah banyaknya Piutang Negara yang tidak memiliki Barang Jaminan sehingga dalam pelaksanaan penagihan tidak bisa dilakukan dengan metode eksekusi.

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan penyerah piutang
- b. melakukan kegiatan penyampaian surat paksa, penagihan langsung, dan penilaian barang jaminan
- c. melakukan sosialisasi door to door terkait Crash Program Penyelesaian Piutang Negara kepada 4 PH yang memenuhi kualifikasi awal.
- d. melakukan sosialisasi door to door terkait Crash Program Penyelesaian Piutang Negara kepada seluruh PH yang memenuhi kualifikasi awal
- e. melakukan penyampaian Surat Panggilan kepada Debitur

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	23	-	27	117,39%	-
2020	20	10	23	115%	140%
2021	10	20	25	250%	125%

5b-CP Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Capaian IKU Persentase produktivitas lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif							
	5b-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	Max/
Realisasi	36,11 %	37,84%	37,84 %	37,39% %	37,39% %	36,51%	36,51 %	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	104,32%	104,32 %	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan calon pemohon lelang terkait objek lelang yang *marketable*
- Melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat agar mengikuti lelang dengan melalui spanduk maupun media sosial
- Membuat database nilai wajar BMN dan harga lelang BMN tersebut agar hasil penilaian yang dijadikan dasar persetujuan penjualan BMN dapat mencerminkan nilai wajar/pasar yang sebenarnya.

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Persentase produktivitas lelang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase produktivitas lelang					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	32%	-	40,72%	127,26%	-
2020	34%	-	38,46%	113,12%	-
2021	35%	-	36,51%	104,32%	-

5c-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Capaian IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif							
	5c-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo selalu menyampaikan informasi kepada pemohon lelang agar pelaksanaan lelang dilakukan secara e-auction dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga semua lelang telah dilaksanakan dengan mekanisme e-Auction dan tetap konsisten untuk melaksanakan lelang hanya melalui e-Auction

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	N/A	N/A	-	-	-
2020	90%	-	100%	111,11%	-
2021	92%	-	100%	108,70%	-

5d-CP Deviasi data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 15%

Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%

Capaian IKU Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif							
	5c-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	12,5 %	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Min/ AVG
Realisasi	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini dibutuhkan koordinasi antara seksi Piutang Negara, seksi Lelang dengan Bendahara Penerimaan pada seksi Hukum dan Informasi.

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Deviasi data PNBPFungsional DJKN dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	N/A	N/A	-	-	-
2020	N/A	N/A	-	-	-
2021	12,5%		0%	120,00%	

6. Sasaran Strategis 6: Edukasi yang efektif

Indikator Kinerja Utama :

6a-CP Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah satu tugas dan fungsi kantor wilayah adalah melakukan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang negara, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan / sosialisasi yang dilaksanakan.

Capaian IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

K-Wide	Edukasi yang efektif							
	6a-CP Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target						93	93	Max/ TLK
Realisasi						95,37	95,37	
Capaian						102,55%	102,55%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa
- Selalu berupaya memberikan edukasi yang baik kepada pengguna saja
- Selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pengguna jasa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	93	-	95,07	102,22%	-
2020	93	-	94,78	101,92%	-
2021	93	-	95,37	102,55%	-

7. Sasaran Strategis 7: Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Indikator Kinerja Utama :

7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Tindak lanjut dilakukan terhadap surat persetujuan pemanfaatan dan

pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh KPKNL Gorontalo selaku pengelola barang selama periode Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021.

Target Semester II 2020 sebanyak 46 persetujuan telah ditindaklanjuti 100%

Target Semester I 2021 sebanyak 30 persetujuan telah ditindaklanjuti 28 Persetujuan

Target tahun 2021 adalah sebanyak 97,37% pengelolaan aset telah ditindak lanjuti.

Capaian IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian yang efektif							
	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target		40%	40%	40%	40%	85%	85%	Max/
Realisasi		92,11%	92,11 %	96,05%	96,05%	97,37	97,37	TLK
Capaian		120%	120%	120%	120%	114,55%	114,55 %	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- selalu mengingatkan kepada satker yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN, baik pemindahtanganan maupun pemanfaatan, untuk segera meindaklanjuti persetujuan tersebut sebelum jangka waktu persetujuan lewat waktu.
- Membuat database rekapitulasi persetujuan pengelolaan BMN dan tindak lanjut yang telah satker lakukan antara lain berupa permohonan lelang untuk penjualan BMN, bukti setor PNPB sewa aset untuk pemanfaatan BMN.

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	70%	-	95%	135,71%	-
2020	80%	-	95,08%	118,85%	-
2021	80%	-	97,37%	120,00%	-

8. Sasaran Strategis 8: SDM yang kompeten

Indikator Kinerja Utama :

8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran dilakukan dengan pemenuhan standar kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2021

IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut:

K-Wide	SDM yang kompeten							
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	25%	50%	50%	106,67 %	106,67 %	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	114,55%	114,55 %	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorotalo KPKNL Gorotalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Membuat database terkait rekapitulasi data diklat/klc yang telah diikuti oleh para pegawai
- Selalu mengingatkan kepada para pegawai untuk mengisi usulan diklat pada saat dilakukan DKI
- Selalu mendorong pegawai untuk mengikuti diklat/klc dalam rangka pengembangan kompetensi masing-masing pegawai
- Pemetaan hard kompetensi dan soft competency pegawai
- Pegawai yang belum memenuhi target jamlat mengikuti pembelajaran open access

pada Kemenkeu Learning Center

- f. Mengusulkan pegawai tersebut untuk mengikuti pelatihan yang tersedia
- g. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi terkait pegawai yang belum memenuhi target jamlat

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Persentase pengembangan kompetensi pegawai dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase pengembangan kompetensi pegawai					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	87%	-	93%	106,73%	-
2020	100%	-	120%	120%	-
2021	100%	-	120%	120%	-

9. Sasaran Strategis 9: Organisasi yang fit for purpose

Indikator Kinerja Utama :

9a-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Admininstrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), understanding (pemahaman peserta terhadap materi FGD), learning enthusiasm (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), contribution to learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai).

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain terkait kode etik, akan terdapat tema lain dalam pelaksanaan FGD. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Capaian IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator adalah sebagai berikut:

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose							
	9a-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	84	84	84	84	84	84	84	Max/ TLK
Realisasi	98,68 %	97,84%	97,84 %	97,84%	97,84%	97,83%	97,83 %	
Capaian	117,4 8%	116,48 %	116,48 %	116,48 %	116,48 %	116,47%	116,47 %	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah antara lain secara rutin menyampaikan informasi kepada para pegawai KPKNL Gorontalo agar dapat secara cepat dan akurat menerima informasi yang benar sehingga dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru. Informasi tersebut tidak hanya terkait kode etik pegawai tetapi tema lain yang berkaitan dengan tugas fungsi Kemenkeu secara umum antara lain terkait kondisi APBN, kondisi ekonomi dan sebagainya

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	N/A	-	-	-	-
2020	80	-	94,83	118,53%	-
2021	84	-	97,83	116,47%	-

9b-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi,

serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Capaian IKU Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC adalah sebagai berikut:

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose							
	9b-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target						75	75	Max/ TLK
Realisasi						89,53%	89,53%	
Capaian						119,37%	119,37%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorotalo KPKNL Gorotalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan internalisasi terkait pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai
- Menyusun dan melakukan penatausahaan dokumen kinerja dengan baik
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara rutin
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi masing-masing seksi/subbag dalam rangka pencapaian target kinerja

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC i dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	92	-	94,43	102,64%	-
2020	70	-	88,67	126,67%	-
2021	75	-	89,53	119,37%	-

10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Indikator Kinerja Utama :

10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.

Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang optimal							
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Sd Q3	Q4	Y 21	Pol/K P
Target	95,50 %	95,50%	95,50 %	95,50%	95,50%	95,50%	95,50 %	Max/ TLK
Realisasi	91,60 %	91,51%	91,51 %	94,70%	94,70%	94,26%	94,26 %	
Capaian	95,92 %	95,82%	95,82 %	99,16%	99,16%	98,70%	98,70 %	

Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut :

- Penyerapan Anggaran Belanja Modal Konstruksi tidak dapat dilaksanakan pada Triwulan I
- Realisasi penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana
- Adanya beberapa RO yang penyerapan anggarannya belum optimal disebabkan

Pada Triwulan III pelaksanaan tugas dan fungsi sempat terhenti karena adanya penyebaran Covid-19

- d. Target penyerapan anggaran yang digunakan pada perhitungan capaian IKU belum jelas apakah 90% atau 98%

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Membuat rencana penarikan dana dan rencana kegiatan yang baik
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran dan capaian output secara rutin
- Melakukan monitoring capaian IKPA pada aplikasi OM SPAN
- Melakukan koordinasi dengan KPPN Gorontalo terkait progres capaian IKPA

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	%Realisasi Target Adendum
2019	95%	-	96,93%	102,03%	-
2020	95%	-	96,45%	101,53%	-
2021	95,50%	-	94,26%	98,70%	-

Berdasarkan 10 sasaran strategis tersebut diatas, dari total 19 IKU yang menjadi kontrak kinerja KPKNL Gorontalo Tahun 2021, sampai dengan akhir Desember 2021 Capaian seluruh IKU di atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,38%.

Adapun NKO KPKNL Gorontalo selama periode 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

Tahun	Nilai Kinerja Organisasi	Keterangan
2019	112,14 % (Hijau)	17 IKU Hijau, 1 IKU Merah
2020	110,66 % (Hijau)	21 IKU, Semua capaian IKU Hijau
2021	113,38 % (Hijau)	19 IKU Hijau, 1 IKU Kuning

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya tertib dan berdisiplin serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Kondisi tersebut coba diatasi oleh KPKNL Gorontalo dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pendampingan secara intens, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penatausahaan dan pengelolaan BMN, namun juga untuk menumbuhkan kesadaran bagi Kuasa Pengguna Barang dan jajarannya, untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN.

2. Masih terdapat Barang Milik Negara bermasalah, yang meliputi Barang Milik Negara belum memiliki dokumen kepemilikan, Barang Milik Negara dikuasai pihak lain, Barang Milik Negara dalam sengketa, Barang Milik Negara belum ditemukan, Barang Milik Negara yang belum dioptimalkan penggunaannya, dan Barang Milik Negara rusak berat tetapi belum dihapuskan.

Terhadap hal tersebut, KPKNL Gorontalo berusaha mengedukasi para satker, misalnya terkait BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, agar segera diikuti program sertifikasi terutama untuk yang clean dan clear, sedangkan untuk yang dikuasai atau terdapat sengketa dengan pihak lain, maka satker perlu intens berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan status aset. Adapun terhadap BMN yang belum optimal penggunaannya, KPKNL Gorontalo mendorong untuk optimalisasi penggunaannya atau dengan cara melaksanakan pemanfaatan apabila aset tersebut belum digunakan untuk mendukung tusi. Hal tersebut telah dilakukan dengan memberikan contoh pemanfaatan langsung atas tanah di KPKNL Gorontalo yang disewakan untuk mendukung PEN dan UMKM. Sedangkan terhadap BMN rusak berat yang belum dihapuskan, KPKNL Gorontalo mendorong satker untuk melakukan inventarisasi BMN kondisi rusak berat atau tidak lagi ekonomis bila digunakan untuk mendukung tusi satker, agar segera diajukan permohonan penghapusannya kepada KPKNL.

3. Pelaksanaan program sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah terkendala oleh data tanah target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batas-batas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid.

Terhadap permasalahan ini KPKNL Gorontalo melakukan pendampingan kepada satker, mulai dari tahap verifikasi dokumen awal, proses koordinasi dengan pihak pertanahan, sampai dengan terbitnya sertipikat atas BMN.

4. Pemahaman peraturan yang tidak merata maupun tidak memadai, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sehingga sering terjadi penafsiran yang berbeda.

KPKNL Gorontalo melakukan sharing knowledge baik secara internal, maupun kepada eksternal/stakeholder berkenaan dengan dinamisasi regulasi terkait pengelolaan BMN, sehingga harapannya terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menerjemahkan peraturan yang ada.

5. Dukungan teknologi informasi/aplikasi di bidang pengelolaan kekayaan negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholder*.

Kondisi tersebut biasanya dilatarbelakangi keterbatasan SDM yang ada di satker, baik secara jumlah, ataupun secara kapasitas. Terkait dengan hal tersebut, KPKNL selalu siaga melakukan pendampingan maupun memberikan layanan konsultasi bagi satker yang membutuhkan bantuan.

6. Terdapat barang jaminan milik debitur tidak dapat dilakukan sita, serta terdapat beberapa debitur yang tidak kooperatif ketika ditagih.

KPKNL Gorontalo telah melakukan dan mengedepankan upaya-upaya pendekatan secara persuasif kepada debitur dalam rangka melakukan penagihan. KPKNL juga intens melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait dengan kondisi barang jaminan. KPKNL juga secara massif dan persuasif mensosialisasikan adanya program keringanan hutang bagi debitur yang memenuhi persyaratan, sehingga dampaknya banyak debitur yang mengikuti program keringanan hutang dan melunasi kewajiban-kewajibannya.

7. Objek lelang masih dihuni oleh debitur (pihak tereksekusi) sehingga masyarakat tidak berminat atas lelang dimaksud (objek lelang belum *clean and clear*).

KPKNL Gorontalo telah melakukan publikasi melalui berbagai media baik online maupun secara langsung kepada masyarakat bahwa jual beli melalui lelang di KPKNL, memang secara prinsip untuk fisik, kondisinya adalah *as is* atau apa adanya, sehingga calon pembeli disarankan untuk mengecek kondisi barang sebelum mengikuti lelang, bisa dilakukan pada tahap *anwijzing* atau secara mandiri, namun KPKNL juga menyampaikan bahwa walaupun secara fisik *as is*, tetapi secara dokumen formil, telah dilakukan verifikasi oleh Pelelang sehingga dirasa lebih aman bagi calon pembeli. Dengan adanya e-auction, pelaksanaan lelang juga dipastikan berjalan secara lebih *fair* dan transparan.

8. Masyarakat masih menggunakan lelang sebagai sarana jual beli sebatas untuk digunakan atau dipakai (*end user*) dan belum sampai tahap investasi.

KPKNL Gorontalo di berbagai kesempatan, baik melalui sarana komunikasi online maupun dalam pertemuan dengan para stakeholder, berupaya untuk terus

mensosialisasikan bahwa jual beli melalui lelang dapat menjadi sarana investasi yang menguntungkan di masa depan, mengingat relatif lebih aman dibandingkan dengan jual beli konvensional, dan dengan dukungan teknologi melalui e-auction, selaras dengan kondisi perkembangan jaman.

B. Realisasi Anggaran

TABEL 6
PENYERAPAN ANGGARAN KPKNL GORONTALO TAHUN 2021

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu setelah Revisi	Realisasi s.d. Des 2021
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1.777.159.000	1.510.535.000	1.459.265.038
Belanja Modal	1.469.186.000	1.344.404.000	1.306.360.720
<i>Self blocking</i>	-	-	-
Dana Khusus	-	-	-
Total	3.246.345.000	2.854.939.000	2.765.625.758

B A B IV

P E N U T U P

- Penutup
- Lampiran



BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Gorontalo serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2021.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Gorontalo pada tahun 2021 secara umum dapat dikatakan baik dan dari target 19 IKU yang ditetapkan 18 IKU berada pada posisi hijau atau melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 1 IKU berada di posisi kuning, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,38%. Selama 3 tahun berturut-turut NKO KPKNL Gorontalo selalu mengalami peningkatan.

Pencapaian ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Gorontalo untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan KPKNL Gorontalo dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah:

1. Melakukan identifikasi dan pendataan bidang tanah BMN yang akan disertipikatkan sesuai dengan peraturan bersama antara BPN dengan Kemenkeu.
2. Melakukan penatausahaan terhadap BMN Idle.
3. Melakukan koordinasi dengan BLU dan Kanwil DJPb terkait Penerimaan PNPB Aset.
4. Memasyarakatkan lelang internet, sebagai sarana jual beli yang mudah dan aman;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang kepada Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPKNL Gorontalo khususnya lelang BMD yang telah dihapusbukukan.
6. Meningkatkan pelayanan penilaian baik BMN maupun BMD.
7. Meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini diakui masih banyak kekurangan, KPKNL Gorontalo siap menerima masukan, saran maupun koreksi untuk perbaikan Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



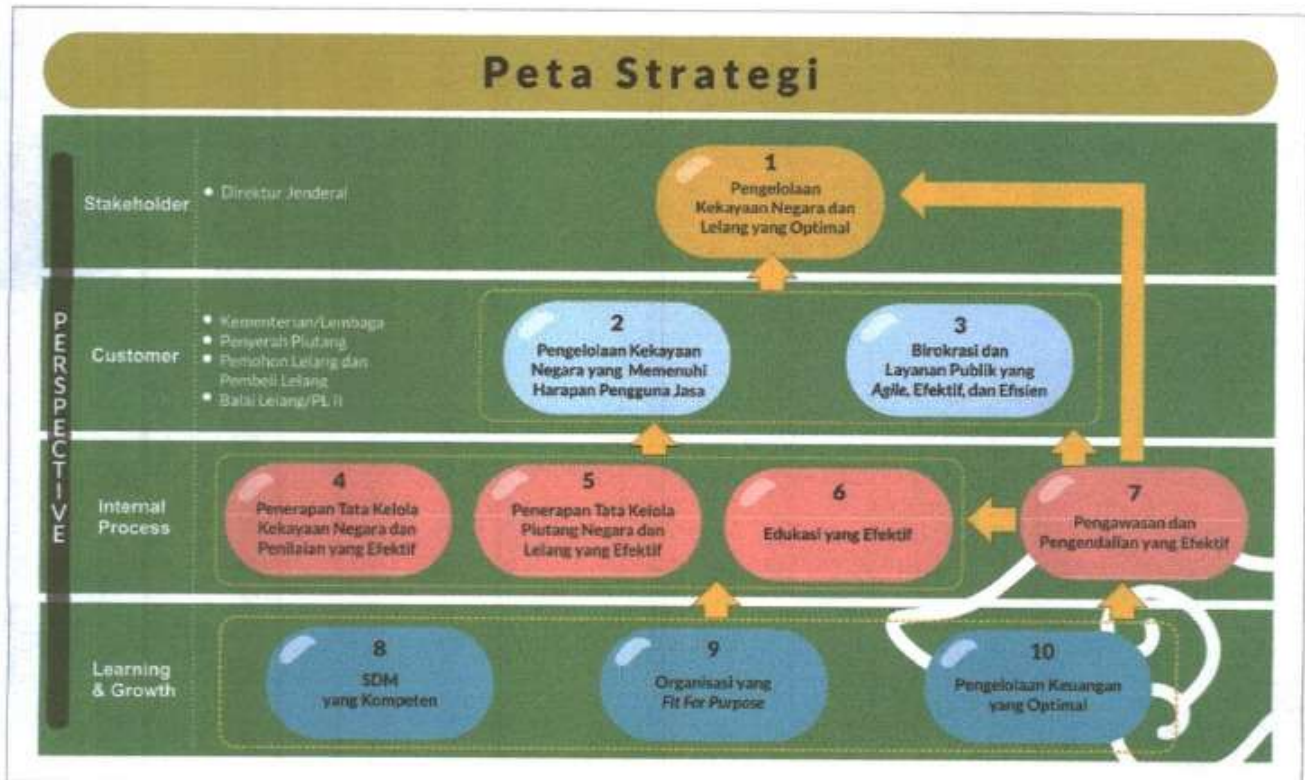
KONTRAK KINERJA
NOMOR 9/KN.28/2021

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	1a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1c-CP	Persentase penurunan nilai <i>outstanding</i> piutang negara	100%
2.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	88 (skala 100)
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
3.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,68 (Skala 5)
4.	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
		4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%
5.	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35%
		5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
		5d-CP	Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93
7.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	85%
8.	SDM yang kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	9a-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84 (skala 100)
		9b-N	Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	75 (skala 100)
10.	Pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

No	Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		202.087.000
1	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	2.400.000
2	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	31.240.000
3	Pengelolaan Aset	168.447.000
Dukungan Manajemen		3.044.258.000
1	Legislasi dan Litigasi	7.136.000
2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.016.138.000
3	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	14.808.000
4	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	6.176.000

Manado, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan negara Sulawesi Utara, Tengah,
Gorontalo dan Maluku Utara,



Aloysius Yanis Dhaniarto

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Gorontalo,



Diana Setiastanti

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU		Target					
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	1a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%
	1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%
	1c-CP	Persentase penurunan nilai <i>outstanding</i> piutang negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	88	88	88	88	88	88 (skala 100)
	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%
3	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien							
	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4,68 (Skala 5)
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif							
	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%
	4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	25%	50%	50%	80%	80%	100%
	4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif							
	5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%
	5b-CP	Persentase produktivitas lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%
	5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-CP	Deviasi data PNBP fungsional DJKN	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%
6	Edukasi yang efektif							
	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	93	93	-	93	93
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							
	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	-	40%	40%	-	40%	85%

No	SS, IKU		Target					
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4
8	SDM yang kompeten							
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%
9	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
	9a-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84	84	84	84	84	84 (skala 100)
	9b-N	Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	-	-	-	-	-	75 (skala 100)
10	Pengelolaan keuangan yang optimal							
	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Manado, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Gorontalo,



Diana Setiastanti

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Aloysius Yanis Dhaniarto	1	Nama	Diana Setiastanti
2	NIP	19660126 199103 1 001	2	NIP	19751230 200212 2 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda/IV.c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina/IV.a
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mewujudkan kesesuaian BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
3	Mengurangi nilai <i>outstanding</i> piutang negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Menyelesaikan layanan kekayaan negara dan lelang dengan tepat waktu	-	88 (skala 100)	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan hasil lelang (Pokok lelang)	-	100%	100	12 bulan	-
6	Meningkatkan Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,68 (Skala 5)	100	12 bulan	-
7	Meningkatkan bidang tanah BMN yang disertipikatkan	-	100%	100	12 bulan	-
8	Menerapkan evaluasi kinerja BMN	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan ketergunaan hasil penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Menyelesaikan BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan produktivitas lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Mengimplementasikan e-auction dan e- conventional auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBPN Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	93	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan aset	-	85%	100	12 bulan	-
16	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
17	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	84	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan pengelolaan kinerja berbasis BSC yang baik	-	75	100	12 bulan	-
19	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	-

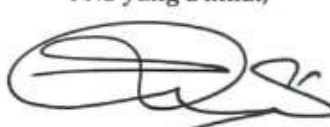
Manado, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,



Aloysius Yanis Dhaniarto
NIP 19660126 199103 1 001

PNS yang Dinilai,



Diana Setiastanti
NIP 19751230 2002 2 001

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	Diana Setiastanti	Nama	Aloysius Yanis Dhaniarto
NIP	19751230 200212 2 001	NIP	19660126 199103 1 001
Pangkat/ Gol.Ruang	Pembina/IV.a	Pangkat/ Gol.Ruang	Pembina Utama Madya/IV.d
Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	IKI 1.1 Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		IKI 1.2 Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	37,45% (Rp.4.114 761.671)
		IKI 1.3 Persentase penurunan nilai <i>outstanding</i> piutang negara	1,18% (Rp.2.441.070)
	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	IKI 2.1 Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	88 (skala 100)
		IKI 2.2 Persentase realisasi pokok lelang	25,52% (Rp.16.842.529.945)
3.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	IKI 3.1 Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,68 (Skala 5)
4.	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif	IKI 4.3 Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%
5.	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	IKI 5.1 Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	30% (6 BKPN)
		IKI 5.2 Persentase produktivitas lelang	35%
		IKI 5.3 Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
		IKI 5.4 Deviasi data PNBPFungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang efektif	IKI 6.1 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93
7.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	IKI 7.1 Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	85%
8.	SDM yang kompeten	IKI 8.1 Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	IKI 9.1 Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80 (skala 100)
		IKI 9.2 Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	75 (skala 100)

10.	Pengelolaan keuangan yang optimal	IKI 10.1 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
B. KINERJA TAMBAHAN			
	-	-	-

Catatan : IKI 4.1 Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi telah tercapai 100% pada semester I 2021
IKI 4.2 Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN telah tercapai 100% pada semester I 2021

Gorontalo, 1 Juli 2021

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Diana Setiastanti
NIP. 19751230 200212 2 001

Aloysius Yanis Dhaniarto
NIP. 19660126 199103 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPKNL Gorontalo
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	94,09%	120
		Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	131,04%	120
		Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDs sd 2016)	100%	123,91%	120
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	88	100	113,64
		Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%	132,49%	120
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,68	4,86	103,85
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100,00%	100
		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	121,43%	120
		Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	1,58%	120
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	Persentase efektivitas penyelesaian BKPn	100%	125,00%	120
		Persentase produktivitas lelang	35%	36,51%	104,32
		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-konvensional auction	92%	100,00%	108,7
		Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	12.5%	0,00%	120
6	Edukasi yang efektif	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	93	95,37	102,55
7	Pengendalian dan pengawasan yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	85%	97,37%	114,55
8	SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120
9	Organisasi yang fit-for-purpose	Indeks efektifitas penyelenggaraan kode etik pegawai	84	97,83	116,47
		Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	75	89,53	119,37
10	Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	94,26%	98,7

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021 : Rp2.854.939.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2021 : Rp2.765.625.758



Penandatanganan Kontrak Kinerja



Penyelesaian Crash Program – Penyerahan Sertifikat Barang Jaminan kepada Penanggung Hutang



Koordinasi Sertifikasi BMN berupa tanah dengan Kantor Pertanahan Kab. Gorontalo Utara



Vaksinasi Covid-19 Tahap 1 dan 2 pegawai KPKNL Gorontalo



Pengembalian Berkas Pengurusan Piutang Negara dari penyerah piutang BPJS Ketenagakerjaan



Penyelesaian Crash Program – Penyerahan Sertifikat Barang Jaminan kepada Penanggung Hutang



Media Visit dan Koordinasi dengan LPP RRI Gorontalo



Media Visit dan Koordinasi dengan LPP TVRI Gorontalo



Dialog Interaktif RRI Gorontalo



Koordinasi dengan Satker PJN Gorontalo



Koordinasi dengan LPMP Gorontalo



Penandatanganan MoU antara Kanwil DJKN Sulutenggomaltut dengan Kanwil DJPB Gorontalo



Peresmian Rumah Dinas KPKNL Gorontalo di JL. Achmad Nadjamuddin, Kota Gorontalo



Pelatihan Service Excellent bersama Bank Mandiri Cabang Gorontalo